

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP 2022 )**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendedayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat sipil sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang

sangat mendukung terselesainya laporan ini.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan LKjIP ini, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas tahun berikutnya.

**Muara Beliti, Februari 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**DODDY IRDIWAN, S.Sos.,M.Si**

**Pembina Tk.I**

**NIP . 19770528 200212 1 004**

## DAFTAR ISI

	<u>halaman</u>
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	9
B. Data Umum Organisasi.....	10
C. Struktur Organisasi.....	11
D. Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Isu Strategi) Organisasi.....	14
E. Landasan Hukum .....	15
F. Sistematika LKJIP .....	15
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b>	
1. Visi .....	17
2. Misi .....	17
3. Tujuan .....	17
4. Sasaran Strategis .....	18
5. Indikator Kinerja Utama.....	18
<b>B. RENCANA KERJA</b>	
1. Program dan Kegiatan.....	19
<b>C. Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>24</b>
A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	24
A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir.....	25
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah.....	26
A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Solusinya.....	28
A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34

	A.7. Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	37
	B. REALISASI KEUANGAN Realisasi Keuangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	43
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Rekomendasi.....	58
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tabel 1.1. Data Pegawai ASN dan Non ASN.....	11
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
Tabel 2.2.	Program dan Kegiatan.....	20
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.2	Perbandingan Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	25
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 .....	27
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	35
Tabel 3.5	Kontribusi Program / Kegiatan atas Pencapaian Kinerja.....	40
Tabel 3.6	Realisasi Keuangan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja .....	42
Tabel 3.7	Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas .....	47
Lampiran		
Tabel 3.8	Pengukuran Indikator Tujuan	
Tabel 3.9	Pengukuran Indikator Sasaran	
Tabel 3.10	Pengukuran Indikator Kinerja Utama	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas. Kantor Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten.

Dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta rasa patriotisme dilakukan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan peserta perwakilan pelajar SMA/SMK di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Pembinaan politik daerah melalui kegiatan FKDM untuk menjaring informasi dari masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Komunitas Intelijen Daerah. Rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah membahas masalah strategis intelijen terkait masalah politik, keamanan, ketertiban konflik konflik horisontal dan vertikal, konflik agama yang secara riil terjadi di masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah di Kabupaten Musi Rawas. Koordinasi Intelijen Daerah membahas masalah strategis terkait hal hal yang berpotensi mengganggu keamanan. Hasil koordinasi digunakan sebagai laporan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, Gubernur, Mendagri dan Menhankam untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Pembinaan politik daerah juga dilakukan melalui pembinaan bagi Ormas, LSM dan OKP sehingga dengan pembinaan ini dapat memantau aktifitas organisasi kemasyarakatan dan mencegah adanya organisasi ekstrem yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat serta mencegah timbulnya terorisme. Untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan saling toleransi, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan adanya dialog antar Pemerintah dengan Tokoh Agama, Tokoh masyarakat. Didalam Forum Kerukunan Umat Beragama

( FKUB ) Kabupaten Musi Rawas kegiatannya bukan hanya dialog dengan pemuka agama maupun tokoh agama untuk menyerap aspirasi, sosialisasi, sarasehan akan tetapi juga memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah selain itu juga melakukan verifikasi bangunan bukan tempat ibadah, tetapi dipergunakan untuk tempat ibadah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Stratejik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Poliitik Kabupaten Musi Rawas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2021 – 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan



misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2022 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Badan dan staf Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Musi Rawas di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.

Pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi rawas tahun 2022 dari 6 (enam) program dengan anggaran dana **Rp. 5.883.592.177,-** teralisasi Rp. **5.742.843.548,-** dengan capaian kinerja 113,78 dari 3 (tiga) sasaran startegis dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021-2022 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian materi laporan menyangkut bidang kesatuan bangsa, ketentraman ketertiban dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas. Meliputi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara, serta Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. Bidang Kewaspadaan Nasional subbidang Kerjasama Intelijen dan Pengawasan Orang Asing, serta Penanganan Konflik dan Ketahanan Sosial Budaya. Bidang Politik dalam Negeri, subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum, serta subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik dan Subbidang Pendidikan dan Peningkatan Demokrasi. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan subbidang Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama. Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **B. Data Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh pejabat dan pegawai, baik ASN maupun Non ASN. Adapun jumlah Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 43 (Empat Puluh Tiga) orang yang dapat diklasifikasikan

berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN**

a. Berdasarkan Golongan

- ASN

<b>Golongan</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Jumlah</b>
I	-	-	-	-	-
II	-	1	1	3	5
III	4	-	2	9	15
IV	4	4	-	-	8
<b>Jumlah</b>					<b>28</b>

- Non ASN

<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>
Non ASN	15

b. Berdasarkan Jabatan

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian / Sub Bidang	10
5	Staf PNS	12
6	Non ASN	15
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>

c. Berdasarkan Pendidikan

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	S-3	-
2	S-2	7
3	S1 / D IV	24
4	D III	1
5	SLTA	11
6	SLTP	-
7	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>

### **C. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Um dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik dalam Negeri dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - b) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

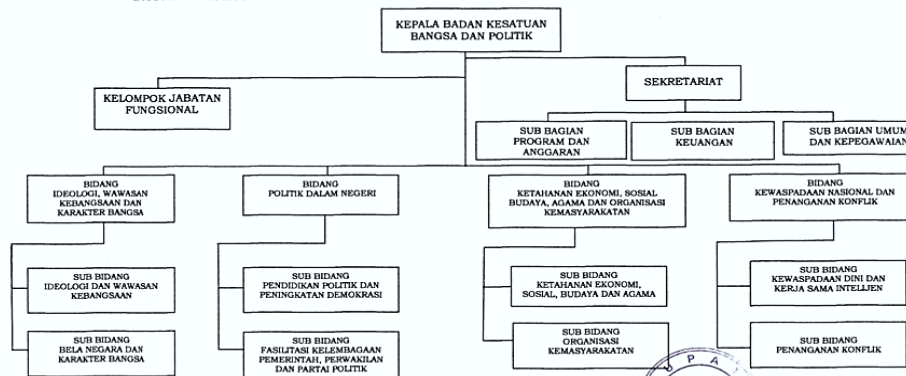
Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik diantara dinas - dinas daerah, badan - badan daerah, instansi vertikal, kecamatan - kecamatan dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten;
- d. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- g. Monitoring pelaksanaan tugas lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 29 TAHUN 2021  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS



#### **D. Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Isu Strategis) Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu

Ada beberapa Isu-isu strategis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang memperoleh perhatian utama adalah :

1. Belum Optimalnya pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pemilihan umum / kepala daerah belum sepenuhnya sesuai dengan yang di tetapkan
2. Masih adanya paham anti pluralisme dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika
3. Luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas sehingga kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa serta lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan

Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya Bidang Politik adalah :

1. Pengaruh Negative globalisasi dan munculnya gejala ideologi yang bertentangan dengan pancasila
2. Menurunnya rasa kebangsaan di masyarakat
3. Menurunnya rasa kebersamaan, individualisme dalam masyarakat.

## **E. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja bagi SKPD adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Langsung di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis SKPD dapat dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang jelas. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja di atas dengan penyusunan Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja, pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **F. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja SKPD selama tahun 2022. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2021 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja tahun 2022 telah disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang



diundangkan pada tanggal 1 desember 2014 sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

**Bab I Pendahuluan** terdiri dari: Data Umum, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama (Isu Strategis) Organisasi, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyajian.

**Bab II Perencanaan Kinerja** terdiri dari Rencana Strategis, Renja dan Perjanjian Kinerja

**Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022** terdiri dari: Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi anggaran

**Bab IV Penutup** terdiri dari: Simpulan umum atas capaian Kinerja Organisasi, dan Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

#### **1. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintahan akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tujuan.

Sehubungan dengan hal itu, Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, yaitu :

***“Terwujudnya Musi Rawas Maju, mandiri, dan Bermartabat (Mantab)”***

#### **2. Misi**

Misi merupakan sesuatu langkah besar yang harus dilaksanakan agar tujuan Organisasi dalam melaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

#### **3. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi. Dalam rangka mencapai Visi

dan Misi yang telah dikemukakan diatas, maka disusun tujuan strategis dengan mempertimbangkan Tugas Pokok dan Fungsi Kedinasan, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi Institusi
2. Meningkatkan Implementasi Kebebasan Sipil dalam Masyarakat

#### **4. Sasaran Strategis**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus di capai pada tahun 2022. Sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### **5. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama SKPD merupakan indikator kinerja yang berada pada prespektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
(1)	(2)
Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan keamanan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
	Profesionalisme ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas

## **B. Rencana Kerja (Renja)**

Rencana Kerja atau bisa kita kenal dengan renja yang berisikan rencana kerja tahun berjalan. Renja SKPD 2022 dibuat pada tahun 2021 yang berisikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Dari uraian dokumen renja 2021 dapat disimpulkan rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

### **1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilakukan SKPD menggambarkan domain Program dan kegiatan SKPD jika dihubungkan dengan Renstra akan terlihat seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program dan Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2		3
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.123.400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.742.305.127
		Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	12.725.400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.834.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.865.600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	140.988.500
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	256.904.200
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik	1.048.062.700
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI</b>	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi	173.697.400

	<b>KEMASYARAKATAN</b>		
		Kemasyarakatan	
5.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	486.374.950
6.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	265.710.400
	<b>JUMLAH</b>		<b>5.883.592.177</b>

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan Bupati Musi Rawas yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja telah mengacu pada Renstra tahun 2021-2026. Dalam dokumen penetapan kinerja 2022, ditetapkan target Indikator Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan keamanan	%	75
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Presentase Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak-hak Politik	%	74
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas	%	70(BB)
	Profesionalisme ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas	%	57

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis adalah pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Reali-sasi	Capai-an
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100 = \frac{6}{6}$
1.	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	75	100	133,33%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-	- Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam	74	100	135,13%



	hak Politik Untuk Pembangunan Daerah	Menggunakan Hak-hak Politik			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70 (BB)	64,95	92,78 %
		Indeks Profesionalitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57 (sangat rendah)	54,23	95,14 %

#### A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	100	100
2.	Meningkatnya	- Persentase	100	100

	Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik Untuk Pembangunan Daerah	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71,20	64,95
		Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64,58	54,23

### **A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022**  
**dengan Target Renstra Badan Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas Tahun**  
**2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	-Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	75	100	133,33	79	126,58
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik Untuk Pembangunan Daerah	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik	74	100	135,00.	78	128,20
7.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70 (BB)	64,95	92,00	80,05	87,90

		Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57 (sangat rendah)	54,23	95,14	70	77,47
--	--	--	--------------------	-------	-------	----	-------

#### **A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya.**

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

- a. Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat
- b. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran strategis tersebut memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022. Dari tabel 3.1, dapat diketahui bahwa capaian kinerja dalam tahun 2022 secara umum telah mencapai **100%**.

Berdasarkan capaian sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan pencapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

**A.5.1. Sasaran 1: Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai – Nilai Kebangsaan Pada Masyarakat, dengan indikator kinerja:**

- **Tingkat Konflik Sara dan Tingkat Konflik Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran dalam mendukung kegiatan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu membantu Pemerintah (Bupati) dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik dan juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga khusus untuk mencapai ketahanan internal dalam masyarakat. Persoalan konflik yang menyangkut kepada kepentingan publik menjadi tugas pokok pemerintah dalam memahami peranan pemerintah di dalamnya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Pemerintah harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Hal ini menunjukkan bagaimana kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu bisa terjadi.

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, target tingkat konflik Sara dan konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan **adalah 75**. Untuk realisasi indikator ini adalah **100** dengan formula pengukuran jumlah koordinasi antar stakeholder yang terlaksana / jumlah target koordinasi yang direncanakan x 100%. Sehingga Capaian indikator ini telah mencapai 133,33%.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, yaitu:

- a. Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
  - Rapat Dewan Pembina bersama Pengurus dan

Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) setiap 3 ( tiga) bulan sekali.

- Menerima aspirasi masyarakat di bidang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Musi Rawas agar sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
- Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) Kabupaten Musi Rawas juga telah melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran ( FPK ) tingkat kecamatan di 14 ( empat belas ) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

b. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK ) Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK ) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Pemerintah, adapun kegiatan yang telah di laksanakan adalah :

- Rapat bersama Pengurus dan Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK ) setiap 3 ( tiga) bulan sekali.
- Menerima aspirasi masyarakat di bidang Wawasan Kebangsaan dan empat pilar kebangsaan agar sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

#### **A.5.2. Sasaran 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah.**

- **Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik**

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, target

indikator untuk persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak – hak politik adalah 74 dan terealisasi 100 sehingga capaian indikator kinerja mencapai 135,13%.

Untuk meningkatkan proses politik demokrasi dimana politik demokrasi tidak akan berlangsung tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasikan dirinya, politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik/masyarakat umum dan tidak dapat melaksanakan kampanye tanpa adanya bantuan keuangan partai politik.

Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik baik yang berasal dari APBN maupun APBD mempunyai tujuan menurut amanah Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 yang telah diroboh dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dipergunakan untuk sebagai berikut :

1.60% dana bantuan keuangan Parpol digunakan untuk meningkatkan pendidikan politik pengurus partai dan kader partai politik tdd :

- a. Seminar
- b. Lokakarya
- c. Dialog interaktif
- d. Sarasehan
- e. Workshop

Kegiatan Pendidikan Politik ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan Politik tersebut berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) Pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan
- d. Pendidikan Politik dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender guna untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **A.5.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dengan indikator kinerja :**

- **Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dari hasil penilaian pada SAKIP Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas memperoleh nilai hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 64,95 atau masuk pada kategori B. Hasil Evaluasi SAKIP internal dari Inspektorat tersebut belum mencapai target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 92,00%.

- **Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah



nilai hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN.

Dalam hal peningkatan kompetensi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan manajemen pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat hingga pelaporan.

Indeks profesionalitas pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas mencapai 54,23 sehingga capaian kerjanya sebesar 95,14.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari BKPSDM Kabupaten Musi Rawas, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas belum berhasil mencapai target Indeks Profesionalitas ASN dan masuk kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan pada komponen dimensi kompetensi seperti mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat struktural belum dilaksanakan.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja atau peningkatan/ penurunan kinerja seringkali dipengaruhi oleh faktor berikut ini :

- a. Komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pengawasan;
- b. Rasio aparatur pengawasan yang belum ideal terhadap obyek pengawasan;
- c. Masih belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan masih terdapat SILPA;
- d. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Untuk mendukung keberhasilan dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang efektif dan efisien, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- b. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompentensi dapat diwujudkan

#### **A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Analisis efisiensi pada pelaporan ini, didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing- masing anggaran. Sisa anggaran pada masing- masing anggaran, dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 telah berjalan efektif dan efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran.

Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4. ANALISIS  
EFISIENSI PENGGUNAAN  
SUMBER DAYA**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja (≥ 100%)</b>	<b>Program</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	1.1 Tingkat Konflik Sara Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	133,00 %	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	99,73%	0,27%
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	99,57%	0,43%
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	99,00%	1 %
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	99,56%	0,44 %

4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak – Hak Politik untuk pembangunan Daerah	2.1	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak – hak politik	135,00 %	Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	98.68%	1,32 %
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.1	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas	96,66%	3,34 %
		7.2	Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95,14			
	Rata-rata penyerapan anggaran dan efisiensi Sumber Daya					98,86%	1,14 %

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dicapai seoptimal mungkin.

#### **A.7. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Terdapat 6 Program dan 11 Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program dan Kegiatan tersebut hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja pada Inspektorat. Program/kegiatan.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas, yaitu:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3. Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik
  - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi politik.
- 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi**  
**Program/Kegiatan atas**  
**pencapaian kinerja**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai – Nilai Kebangsaan Pada Masyarakat	1.1 - Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	Indeks	74	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	256.904.200
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	265.710.400
					Program	173.697.400



						Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	486.374.950
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak – Hak Politik untuk pembangunan Daerah	2.1	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak – hak politik	Indeks	73	Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.048.062.700
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Administr	3.1	Nilai hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kategori	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.640.117.127

	asi Pemerintah		Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	54	Musi Rawas	
						<b>Total Anggaran Program</b>	<b>5.883.592.177</b>

## B. REALISASI KEUANGAN

**Tabel 3.6**  
**REALISASI KEUANGAN YANG MENDUKUNG**  
**PENCAPAIAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Nama Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai – Nilai Kebangsaan Pada Masyarakat	1.1	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	75	100	133,33 %	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	256.904.200	256.208.100	99,73 %

						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	265.710.400	264.592.600	99,57%
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	173.697.400	171.966.392	99,00%

							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	486.374.950	484.247.550	99,56%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak – Hak Politik untuk pembangunan Daerah		Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak – hak politik	74	74	101,37	Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.048.062.700	1.034.260.063	98.68%

3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.1	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	BB	125%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas	3.640.117.127	3.518.843.443	96,66%
		3.2	Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54	54,92	101,70				
								<b>5.883.592.177</b>	<b>5.742.843.548</b>	<b>97,61%</b>

**Tabel 3.7.**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi**  
**Rawas TA. 2022**

No.	Prioritas Program dan Kegiatan	PLAFON ANGGARAN (PERUBAHAN)	PENYERAPAN		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				
			Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	Narasi	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS</b>	3.640.117.127	3.518.843.443	96,66%					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>148.123.400</b>	<b>146.693.600</b>	<b>99.03%</b>					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.812.700	74.861.300	98,75%	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	14	14	100,00%

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	7.676.600	7.676.600	100,00%	Jumlah Penyusunan RKA - SKPD yang Tersedia	Dokumen	1	1	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	7.934.000	7.934.000	100,00%	Jumlah Penyusunan Perubahan RKA - SKPD yang Tersedia	Dokumen	1	1	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	7.676.600	7.676.600	100,00%	Jumlah Penyusunan DPA - SKPD yang Tersedia	Dokumen	1	1	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	7.934.000	7.934.000	100,00%	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA - SKPD yang Tersedia	Dokumen	1	1	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Lap.Kinerja dan Ikhtas Realisasi kerja SKPD	41.089.500	40.611.100	98,84%	Jumlah Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kerja SKPD	Dokumen	12	12	100,00%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.742.305.127</b>	<b>2.641.680.867</b>	<b>96,33%</b>					
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.800.327	2.564.176.067	96,22%	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun (bulan)	14	14	100,00%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	66.641.100	66.641.100	100,00%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	12	12	100,00%



	Keuangan SKPD				Keu SKPD				
9	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/TW/Semester SKPD	10.863.700	10.863.700	100,00%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/TW/Semester SKPD	Dokumen	4	4	100,00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.725.400</b>	<b>12.725.400</b>	100,00%					
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.725.400	12.725.400	100,00%	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap.Barang Milik	Dokumen	4	4	100,00%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230.834.500</b>	<b>230.432.257</b>	<b>96.41%</b>					
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.487.000	14.956.000	99,74%	Jumlah Jenis Peralatan Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	8	8	100,00%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.847.500	3.822.500	99,35%	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1	1	100,00%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangn-undangan	12.000.000	12.000.000	100,00%	Jumlah Media yang Tersedia	Bulan (Eksemplar)	12 (120)	12(120)	100,00%

14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.500.000	203.152.757	99,83%	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar dan Dalam Daerah	Kali	157	157	100,00%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>349.455.845</b>	<b>346.350.750</b>	<b>99,11%</b>					
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%	Jumlah Materai yang Tersedia	Lembar	500	500	100,00%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	59.316.450	46.534.556	78,45%	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar	Rekening	12	12	100,00%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.549.150	314.772.913	99,75%	Jumlah jasa pendukung Adm.Perkantoran,AT K dan Bahan Pembersih	Bulan	12	12	100,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>155.241.700</b>	<b>147.104.999</b>	<b>94,75%</b>					
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.988.500	112.729.250	95,54%	Jumlah biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas	Unit Roda 4/Unit Roda 2	2/9	2/9	100,00%

No.	Prioritas Program dan Kegiatan	PLAFON ANGGARAN (PERUBAHAN)			Indikator Kinerja Keluaran (Output)				
			Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	Narasi	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	23.000.000	100,00%	Jumlah Perawatan Lektop yang tersedia	Unit	7	7	100,00%
<b>B.</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Karakter Kebangsaan</b>	<b>256.904.200</b>	<b>256.208.100</b>	<b>99,973%</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>256.904.200</b>	<b>256.208.100</b>	<b>99,973%</b>					
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	256.904.200	256.208.100	99,973%	Jumlah Pengurus PPWK yang difasilitasi, Jumlah Pengurus FPK yang difasilitasi dan Hibah Uang yang tersedia	Orang	50	50	100,00%

C.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	1.048.062.700	1.034.260.063	98,68%					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>	1.048.062.700	1.034.260.063	98,68%					
21	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilu	101.321.300	98.729.300	97,44%	Jumlah Partai Politik yang diverifikasi Kelengkapannya	Partai Politik	10	10	100,00 %

	Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik								
22	Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidanng Pendidikan Politik Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik,Pemilukada serta Pemantauan Situasi politik	946.741.400	935.530.763	98,82%	Jumlah Partai Politik yang diverifikasi kelengkapan Adm.dan Hibah Uang Terhadap Partai Politik	Partai Politik	10	10	100,00 %
D.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>256.904.200</b>	<b>256.208.100</b>	<b>99,00%</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>173.697.400</b>	<b>171.966.392</b>	<b>99,00%</b>					
23	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran	36.760.000	35.028.992	95,29%	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ormas FKMS	Dokumen	7	7	100,00 %

	Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Th.2021				
24	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	136.937.400	136.937.400	100,00%	Jumlah Peserta Tim Terpadu Pemberdayaan Ormas FKMS Th.2021	Orang	39	39	100,00 %
E.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>486.374.950</b>	<b>484.247.550</b>	<b>99,56%</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>486.374.950</b>	<b>484.247.550</b>	<b>99,56%</b>					
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	486.374.950	484.247.550	99,56%	Jumlah Peserta Rapat Forum FKUB dan Hibah	Orang	33	33	100,00 %

	dan Penghayat Kepercayaan diDaerah								
F.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>265.710.400</b>	<b>264.592.600</b>	<b>99,57%</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>265.710.400</b>	<b>264.592.600</b>	<b>99,57%</b>					
26	Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini.Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing	108.519.600	108.079.500	99,59%	Jumlah Laporan Kantrantibmas yang Tersedia	Laporan	12	12	100,00 %

	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
27	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	157.190.800	156.513.100	99,57%	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang tersedia	Laporan	12	12	100,00 %



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Konsep akuntabilitas pada setiap instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, memerlukan pendalaman pemahaman secara sistematis dan komprehensif Khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas serta semua jenjang manajemen dilibatkan dalam proses peningkatan pemahaman dan arah pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, terutama pada jenjang *top* dan *middle management*, melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan tercapai 113,78% maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai

dengan Baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Musi Rawas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Musi Rawas.

## **B. Rekomendasi**

Strategi dan Langkah yang diambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsinya mendatang antara lain :

1. Lebih fokus berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Organisasi Politik/Organisasi Masyarakat sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memperbaiki dan Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan agar dokumen perencanaan dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pada pelaksanaan program di tahun berikutnya.

3. Konsistensi dan komitmen yang tinggi dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

**Musi Rawas, Februari 2023**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**DODDY IRDIWAN.S.Sos.,M.Si**  
Peminda Tk.I  
NIP . 19770528 200212 1 004

# LAMPIRAN

**TABEL 3.8**  
**PENGUKURAN KINERJA TUJUAN**

<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Demokrasi	Indeks	75	78,63	104,00

Formula : Menggunakan data indeks demokrasi Provinsi tahun 2021, dikarenakan survey indeks Demokrasi tahun 2022 sedang tahap pelaksanaan

Sumber : <https://bps.go.id/indicator/34/2159/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>

**TABEL 3.9**  
**PENGUKURAN KINERJA SASARAN**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73	75,20	103,00

Formula : Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/jumlah total aspek kehidupan beragama X 100%

Sumber : Laporan kegiatan tim survey Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Musi Rawas bersama tim Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2022

**TABEL 3.10**  
**PENGUKURAN KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100 = \frac{5}{6}$
1.	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan	75	100	133,33%

2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik Untuk Pembangunan Daerah	- Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik	74	100	135,13%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70 (BB)	64,95	92,78 %
		Indeks Profesionalitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57 (sangat rendah)	54,23	95,14 %

Formula :

1. Sasaran 1 (Jumlah koordinasi antar stake holder yang terlaksana /Jumlah target koordinasi yang direncanakan) x 100 %
2. Sasaran 2 (realisasi partai politik yang menerima bantuan keuangan)
3. Sasaran 3 (sumber dari Inspektorat dan BKPSDM)